



## **Mengungkap Visi dan Agenda Fatma A. Hollang dalam Membangun Indonesia Baru Berkesetaraan Gender Pasca Pemilu 2004 di Kota Pare-Pare**

### ***Uncovering Fatma A. Hollang's Vision and Agenda in Building A New Indonesia With Gender Equality After The 2004 Election in Pare-Pare City***

Ashari Ismail<sup>1</sup>, Firdaus W. Suhaeb<sup>2</sup>, Mario<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Indonesia  
[ashariismail272@gmail.com](mailto:ashariismail272@gmail.com)\*

---

**Abstrak.** Mengurai, tentang peran perempuan, dalam dinamika komunitas pejuang hak – hak perempuan, tidak akan ada habisnya dalam sejarah keindonesian. “Meninggal satu, maka akan lahir sepuluh orang atau lebih”. Mengapa demikian ? Karena problematik keperempuanan adalah, problematik nilai kemanusiaan. Problematik pemanusiaan, masa lalu, sekarang dan akan datang. Pemanusiaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pemanusiaan adalah kunci, membangun kebangsaan. Dalam kaitan ini, salah satu kajian yang perlu diketengahkan, adalah visi dan agenda perempuan Anggota DPRD Hasil Pemilu, 2004 Kota Pare-Pare, dalam membangun Indonesia Baru, yang berkesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan riset kualitatif, peneliti menguak (mengungkap) kembali, kiprah dan pemikiran Fatma A Hollang, dalam membangun ke Indonesiaan yang berkesetaraan gender. Hasil riset menyatakan : Fatma A Hollang adalah sosok perempuan yang cukup aktif memperjuangkan nasib rakyat kecil, menyuarakan membangun kemandirian kaum perempuan, memberikan hak politis yang sederajat dengan kaum laki-laki dan menumbuhkan dan memberikan keterampilan dan modal kerja bagi kaum wanita. Demikian juga Fatma A Hollang, menegaskan perlunya menyediakan sarana pemukiman yang memadai yang layak bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini, menjadi penekanan Fatma A. Hollang, dalam Agenda dan Visinya, membangun Indonesia kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** Visi, Agenda Fatma A. Hollang.

**Abstract.** *Unraveling, about the role of women, in the dynamics of the community of fighters for women's rights, will be endless in Indonesian history. “One dies, ten or more will be born”. Why is that? Because the problem of womanhood is a problem of human values. The problem of humanity, past, present and future. Humanizing from one generation to another. Humanity is the key to building nationality. In this regard, one of the studies that need to be addressed is the vision and agenda of women legislators from the 2004 Pare-Pare City elections in building a new Indonesia with gender equality. By using a qualitative research approach, the researcher uncovered the work and thoughts of Fatma A Hollang in building a gender-equal Indonesia. The research results state: Fatma A Hollang is a woman who is quite active in fighting for the fate of the little people, voicing building women's independence, giving political rights equal to men and fostering and providing skills and working capital for women. Likewise, Fatma A Hollang emphasized the need to provide adequate housing facilities for people who cannot afford it. This is emphasized by Fatma A. Hollang, in her Agenda and Vision, building a gender-equal Indonesia.*

**Keywords:** *Vision, Agenda Fatmah H. Holang.*

---

#### **1. PENDAHULUAN**

Kota Pare-pare merupakan kota yang berada di sebelah Barat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar ±

150 km dari kota Makassar. Kota ini dianggap sebagai kota niaga, jasa dan industri. Jika menengok pada data lama, data dari BPS 2001, maka sejak dahulu,

masayarakat Pare-Pare, memang kota yang pertumbuhan ekonomi dan penduduknya pesat. Pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya cukup meningkat dengan rata-rata sekitar 4,54% setiap tahun, dengan income perkapita adalah : Rp. 3.702.969, angka ini cukup fantastis dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Kontribusi yang cukup menjadi andalan dalam PDRB Kota Pare-pare adalah perdagangan jasa, angkutan, komunikasi, dan Industri. Penduduk kota Pare-pare ini, umumnya didominasi oleh etnis : Bugis-Makassar. Namun demikian banyak juga kelompok etnis lain seperti : Toraja, Luwu, Mandar. Kelompok etnis ini hidup secara damai dalam nuansa saling membutuhkan dan memberi dalam kehidupan.

Masyarakat Pare-pare, adalah masyarakat 'penutur bahasa Bugis yang fasih. Kalau kita jalan di Kota Pare-pare ini pasti kita hanya akan mendengar bagaimana komunitas ini memakai bahasa "bugis" walaupun mereka tidak sedikit beretnis bukan Bugis. Pemakaian bahasa ini cenderung menjadi media perekat berbudaya dalam pola budaya saling membutuhkan dan menolong satu sama lain. Kesaling hubungan dan kemajuan komunitas Kota Pare-Pare mulai nampak terlihat dibawah kepemimpinan H. Zoin Katoe. Kepemimpinan Zoin Katoe membawa kota Pare-pare mengalami kemajuan di berbagai bidang. H. Zoin Katoe dianggap sebagai pendekar ekonomi pemberdayaan masyarakat peisir yang gigih memberantas kemiskinan. Ada dua model pengembangan Pare-pare dalam misi pembangunan yaitu, model Tradisional dan Modern. Model Tradisional yaitu bagaimana mengembangkan wisata alam, sedang model modern yaitu model pembangunan dari luar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan komunitas Parepare. Kota Pare-pare cukup terkenal dengan kota jaringan, jalan yang dilewati melalui trans Sulawesi. Jalan lingkaran atau dikenal dengan "Outer ringroad" yang merupakan jalan alternatif lalu lintas regional. Pare-pare terkenal dengan 5 pelabuhan yaitu : Pelabuhan khusus Pertamina, Pelabuhan Lontonge, Pelabuhan Cappa Ujung, dan Pelabuhan Nusantara. Dengan pelabuhan ini menjadikan Pare-pare sebagai kota yang memiliki keunikan dibanding dengan kota/ kabupaten lain di Sulawesi Selatan, yakni suatu kota interinsuler dan sebagai kota kecil yang berkedudukan sebagai peabuhan interinsuler.

Pemahaman, akan kondisi Pare - Pare demikian, maka keterpilihan Fatma A. Hollang, sebagai anggota DPRD 2004, menuntutnya, untuk

merancang agenda dan visi pembangunan. Selain kondisi Pare-pare, hal lain yang menjadi sandaran pemikiran Fatma A. Hollang adalah budaya kota Pare-pare juga terkenal dengan budaya : *Resopa Temmeangngingi Namalomo Naleteti Pammase Dewata* (dengan kerja keras tanpa pamrih akan mendapat ridho dari Allah SWT.). Demikian juga budaya dan prinsip hidup seperti *Taro ada Taro Gau* (satu kata dengan perbuatan). Budaya dan prinsip hidup demikian menjadi, bagian dari konstruksi agenda dan visi Fatma A Hollang, merancang visi pembangunan kehidupan yang berkesetaraan gender, dan memperjuangkan nasib rakyat kecil.

## 2. METODE

Penelitian ini, adalah penelitian ketokohan, yang berangkat dari pemikiran, gagasan, dan agenda sang aktor, memahami problematik kemasyarakatan. Penelitian berupaya, menggunakan 2 (dua) pendekatan kombinasi, yakni fenomenologi dan solipsisme. Fenomenologi adalah riset yang berupaya mengurai pengalaman pribadi atau pola pikir dan pola tindak yang ditunjukkan. Solipsisme adalah juga pendekatan yang berupaya memahami subyek aktor berdasarkan pengamatan sang aktor (Hasyim dan Ismai, 2005) yang cenderung dapat dipahami, berdasarkan sudut pandang si peneliti. Dalam kaitan ini, maka penokohan Fatma A. Hollang, adalah hal yang dapat dicermati berdasarkan fenomenologi dan solipsisme, guna memberikan gambaran yang utuh dari apa yang diteliti (Sihombing, 2024).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil Penelitian

Profil Fatma A. Hollan, S.H. adalah seorang perempuan kelahiran Parepare, 22 Desember 1964. Saat penelitian ini dilakukan, tinggal di Jl. Bau Massepe No. 87 Parepare. Pendidikan yang pernah diikutinya adalah : SDN 1 Toli-Toli 1977, SMPN 5 Parepare 1981, SMAN 2 Parepare 1984 dan Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum 1995. Fatma A. Hollang, adalah perempuan yang cukup getol memperjuangkan nasib rakyat kecil, --- pernah menjabat sebagai Tata Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare. Pendidikan dan pekerjaan yang pernah digelutinya menjadi bekal berharga dalam meniti karir politiknya. Fatma A. Hollan adalah anggota legislatif dari Partai Golongan Karya hasil Pemilu 2004. Ia memulai masuk Golongan Karya pada 1997, dan terpilih menjadi anggota dewan pada pemilu 2004. Motivasi utama ikutnya menjadi

anggota dewan adalah membela kepentingan kaum lemah terutama wanita dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurutnya lebih jauh bahwa model Indonesia yang harus dibangun agar dapat keluar dari krisis adalah model Indonesia yang memakai system transparansi. Reformasi baku yang dibangun adalah reformasi yang bertumpuh pada system dan perencanaan partisipasi dan partisipasi secara *bottom up* dalam nuansa pembangunan kerakyatan.

Fatma A. Hollan memandang bahwa kaitannya dengan pembangunan dan kebijakan kota maka hal yang perlu dikedepankan dalam membangun Indonesia Baru yang berkesetaraan gender adalah perlunya membela hak-hak kaum manusia dan ditempatkan sesuai dengan proporsinya dalam rangka memberikan motivasi bagi kaum wanita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nampaknya Fatma A. Hollan memahami bahwa perlunya memberikan motivasi bagi kaum perempuan sebagai sentra atau fondasi keluarga---. Suatu pemikiran yang cerdas dan elegan dalam nuansa pembangunan manusia. Terkait dengan ini maka beberapa agenda/visinya dalam rangka memberdayakan potensi daerah seputar tentang kesetaraan gender adalah : membangun kemandirian kaum wanita, memberikan hak politis yang sederajat dengan kaum laki-laki dan menumbuhkan dan memberikan keterampilan dan modal kerja bagi kaum wanita, penataan rumah atau menyediakan sarana pemukiman yang memadai yang layak bagi masyarakat yang tidak mampu. Demikian pula, dalam kaitannya dengan pembangunan hukum menurut pandangan Ibu Hollan adalah perlunya perangkat hukum yang jelas terhadap kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Dalam kaitannya dengan pembangunan --- budaya, maka Fatma A Hollan mempermaklumkan perlunya dibangun dan menggali budaya tradisional. Demikian pula dipahami oleh Fatma A. Hollan, hendaknya : dalam system hukum positif para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme diberikan tindak tanpa pandang bulu. Jelas dalam hal ini dalam pandangan Fatma A. Hollan, bahwa pelestarian budaya local adalah hal yang vital karena menyangkut unsur eksistensi masyarakat. Dan pemberuan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme karena sumber kebobrokan masyarakat karena praktek --- kotor yang dilakukan oleh para oknum yang mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal lain Farma A. Hollan memahami bahwa orientasi pembangunan - -- kesetaraan gender harus diarahkan pada keimanan

dan keterampilan yang sesuai dengan kondisi komunitas lokal. Demikian pula peran-peran yang strategi harus diarahkan pada keterwakilan perempuan oleh perempuan sendiri dalam parlemen. Cukup dipahami pemikiran Fatma A. Hollan ini, menginginkan dan mengharapkan perempuan --- sebanyak mungkin duduk sebagai anggota legislatif karena hanya perempuan yang lebih --- memahami berbagai permasalahan atau problem perempuan.

Dalam hal lain pula, Fatma A. Hollan memahami bahwa dalam membangun kesetaraan gender, wanita sendiri harus lebih proaktif untuk ikut mensosialisasikan diri dan mengedepankan aspek pendidikan. Demikian pula menurutnya bahwa pembangunan religious amat diperlukan guna terciptanya moralitas bangsa atau Negara yang bertumpu pada kesadaran gender, bukan ketimpangan atau ketidakadilan yang membawa wanita dalam posisi yang ter subordinasi.

## b. Pembahasan Penelitian

Ketokohan atau kepemimpinan adalah konsepsi baku, dalam teori – teori kekuasaan, tentang ikhtiar untuk menundukan orang lain (Sintani, Fachrurazi, Mulyadi, Fauziah, Hartono & Jusman, 2022)., hubungan antara sang pemimpin dan yang dipimpin (Nurhalim, Saputra, Ningsih, Amirulah, Musli & Jamrizal, 2023).,namun semua hal demikian, berangkat dari konstruksi. Merujuk pada teori konstruksi Peter Berger, bahwa manusia adalah aktor yang mengkonstruksi tindakan sosial (Mulyana, 2017). Dalam hal demikian, maka kelahiran sosok pemimpin, adalah konstruksi masyarakat, tentu semua hal demikian, kembali demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hal demikian, jika dipahami sebagai hal dialektif, maka kejadiannya tidak ada yang berdiri sendiri dan berlangsung secara simultan; *eksterialisasi; objektivasi; dan internalisasi* (M. Poloma 1994).Internalisasi adalah value, sebagai sandaran penghayatan dalam diri, eksternalisasi memaknai diri, sebagai hal ada dalam masyarakat dan *objektivasi* adalah keterhubungan atau kesalingtergantungan. Model ini, secara teortis akan dilangsungkan sang aktor, dalam peran-perannya dalam masyarakat. Dalam hal lain, merujuk pada Iloyd, (1993) maka kiprah aktor dalam perannya akan tidak lepas *agency; struktur, sosial, mentalite, dan causal factor* (Iloyd, 1993). Memahami, teori – teori diatas, maka cukup dimengerti bahwa posisi aktor dalam hal ini subyek riset, adalah tidak hanya dikonstruksi, tetapi juga dapat mengkonstruksi berdasarkan peran-peran dalam masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Fatma A Hollang adalah sosok perempuan yang dikonstruksi, dari pengamalan diri, pola budaya dan peran-peran komunal yang ada dalam masyarakat. Fatma A. Hollang, adalah perempuan yang memperjuangkan nasib wong cilik, memiliki agenda besar dalam membentuk perempuan dengan sikap mandiri, dan menginginkan kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan. Selain agenda di atas, Fatma H. Hollang, menginginkan pembangunan masyarakat, yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan agenda demikian, maka visi Ibu Hollang adalah; Indonesia yang maju, yang berkesetaraan dan jauh dari ketidakadilan.

#### 5. REFERENSI

- Demartoto, Argyo, 2013. Teori Konstruksi Sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckman . <HTTPS://ARGYO.STAFF.UNS.AC.ID/2013/04/10/TEORI-KONSTRUKSI-SOSIAL-DARI-PETER-L-BERGER-DAN-THOMAS-LUCKMAN/>
- Hasyim, Hadjarah dan Ismail, Ashari. 2005. Profile dan Visi Perempuan Anggota DPR Tingkat Provinsi dan Kota/ Kabupaten Hasil Pemilu 2004 Di Sulawesi Selatan Dalam Membangun Indonesia Baru yang Berkesetaraan Gender. FEIS. UNM
- Lloyd, Christopher, (1993), *The Structures of History*, Cambridge : Blackwell Publisher.
- Mulyana, Agus. 2017. Agency Dan Mentalite: Pendekatan Dalam Memahami Perubahan Sosial. <https://sejarah.upi.edu/2017/08/15/agency-dan-mentalite-pendekatan-dalam-memahami-perubahan-sosial/>.
- M. Poloma, Margaret. 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. ; PT Radja Grafindo Persada.
- Sintani, L., Fachrurazi, Mulyadi, Nurcholifah, I., Fauziah, Hartono, S., Jusman, I., A. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Batam : Cendekia Mulia Mandiri.
- Nurhalim, Saputra, M., Z., A., Ningsih, N., S., Amirullah, Musli, & Jamrizal. (2023). Konsep Kepemimpinan : Pengertian, Peran, Urgensi, dan Profil Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1).
- Sihombing, Masly dkk. 2024 Perubahan Politik di Indonesia Selama Masa Pendudukan Jepang . *Jurnal . JAHE - Jurnal Akuntansi Hukum dan 1.* (2)